ECOUNTBIS Economics, Accounting and Business Journal

Vol. 1 No. 1, September 2021

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

Zul Hazmi Alfurqani[1], Dwi Widiarsih[2], Jeki Algusri[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
E-mail: 170302006@student.umri.ac.id

Abstrak

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada awalnya oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*) (Sjafrizal, 2008).

Kata Kunci: Ketimpangan pembangunan, dana alokasi umum, belanja modal dan investasi

PENDAHULUAN

Terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya membawa implikas ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya, guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan pembangunan yang ekstrim adalah inefesiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan solidaritas serta ketimpangan ekonomi dipandang tidak adil.

Provinsi Riau merupakan Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, dimana terdapat 10 Kabupaten dan 2 Kota didalamnya. Provinsi Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan dan hasil laut. Jika semua sumber daya alam dikelola dengan baik, sesuai dengan potensi yang derdapat di masing-masing Kabupaten/Kota, maka akan memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Riau. Namun jika dilihat dari pembangunan ekonomi di Provinsi Riau saat ini masih banyak yang belum merata. Ini artinya terdapat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Hidayat (2018) berpendapat bahwa ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau haruslah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Isu ketimpangan perekonomian antar daerah berkaitan erat dengan usaha pertumbuhan ekonomi dan harmonisasi sosial. Bila antar Kabupaten/Kota terjadi tingkat pendapatan tertentu yang menunjukan kenaikan ketimpangann maka akan beimplikasi pada kondisi kesejahteraan suatu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Riau?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, belanja modal dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Riau?

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

PEMBANGUNAN

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang paling penting dan wajib dilakukan oleh semua negara, karena karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuana telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan masnusia. Seperti yang terdapat didalam Sukirno (2012) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.sebagai implikasi dari perkemangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tingggi.

Megarani dalam Dumairy (1997) berpendapat bahwa pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadikan keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan, keberhasilan pembangunan sering diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu disetiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap pembangunan formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

DANA ALOKASI UMUM

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Alokasi DAU merupakan pelaksanaan atas desentralisasi dalam otonomomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dimaksud dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

BELANJA MODAL

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu priode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Halim, 2012). Dana yang peroleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Namun setelah adanya sistem anggaran berdasarkan permendagri No.13 tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja lansung dan belanja tidak lansung. Belanja lansung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program. Belanja lansung terdiri dari kegiatan pembuatan jalan, kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah dianggarkan. Sedangkan belanja tidak lansung adalah bagian dari belanja yang dianggarkan tidak terkait lansung dengan pelaksaan program. Belanja tidak lansung terdiri dari: belanja pebawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga lainnya.

INVESTASI

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi (Sukirno, 2005).

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari

sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1: Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di provinsi Riau.

H_2: Diduga Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di provinsi Riau.

H_3: Diduga Investasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan di provinsi Riau.

H_4: Diduga Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan di provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang berlangsung ilmiah dan sistematis dimana pengamatan yang dilakukakan mencakup segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian, fenomena serta korelasi yang ada diantaranya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup yang di alami masyarakat.

Penelitian ini di lakukan di Pekanbaru, karena Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Penelitian ini di mulai dari Oktober 2020 - Juli 2021. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah laporan PDRB provinsi Riau yang tersedia di BPS provinsi Riau. Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya ada 3, yaitu Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik literature. Teknik pengumpulan ini melalui teks-teks tertulis, seperti buku, jurnal, arsip, publikasi pemerintah dan lain-lain. Untuk metode pengumpulan datanya adalah data sekunder, yaitu mengumpulkan data-data dari BPS Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat dan varibel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan, dan variabel bebasnya di bagi menjadi 3, yaitu Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

ANALISIS KETIMPANGAN

Dalam penelitian ini akan digunakan Indeks Williamson dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi Riau. Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar dan sama dengan 0 (nol) dan lebih dari 1 (satu). Jika angka indeks sama dengan 0 (nol) hal ini berarti tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di provinsi Riau. Sedangkan jika angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Riau. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota yang terjadi.

Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient off variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Indeks* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Indeks ini juga mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demekian indeks ini juga cukup banyak digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah.

Dengan menggunakan alat ini analisis Indeks Williamson akan diketahui ada tidaknya ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Riau. Rumus Indes Williamson sebagai berikut:

Rumus: Indeks Williamson

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(f_i/n\right)}}{y}$$

Dimana:
y_i = PDRB per kapita daerah i
y = PDRB per kapita seluruh daerah
f_i = Jumlah penduduk daerah i
n = Jumlah penduduk seluruh daerah

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Penelitian ini menggunakan model analisis persamaan regresi linear berganda untuk menjelaskan hubungan spesifik antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomidan Jumlah Pengangguranterhadap Kemiskinan, penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Ghozaly dalam Arief Eka Atmaja (2011**)** mengatakan Ordinary Least Square (OLS) adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependent. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rumus: Model Persamaan

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \mu$$

Dimana:
Y = Ketimpangan
X1 = Dana Alokasi Umum
X2 = Belanja Modal
X3 = Investasi
$\beta 1$ = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum
$\beta 2$ = Koefisien regresi Belanja Modal
$\beta 3$ = Koefisien regresi Investasi
α = bilangan konstanta
μ = Variabel Penganggu

UJI GOODNESS OF FIT

Proses analisis yang akan dilakukan melalui pengujian variabel-variabel independen yang meliputi uji t (uji individu), uji F (uji bersama-sama), dan uji R^2 (uji koefisien determinasi).

UJI t (t-statistik)

Uji t ini merupakan pengujian variabel-variabel independen secara individu, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan (Gujarati, 2006). Bila probabilitas t-statistik < α (0.05) artinya ada pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan di provinsi Riau, Bila probabilitas t-statistik > α (0.05) artinya tidak ada pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan di provinsi Riau.

UJI f (f-statistik)

Uji F ini untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila dari perhitungan F hitung lebih besar dari F tabel maka Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan bahwa variabel terikat secara bersama-sama, sebaliknya juka F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ha ditolak (Gujarati, 2006).

ANALISIS DETERMINASI (R^2)

Nilai R^2 untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu ($0<R^2<1$). Jika koefisien determinasi 0, artinya tidak ada persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen (Priyatno dalam Atmaja, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Williamson

Dari hasil pengolahan data PDRB menurut harga konstan yang bersumber dari BPS Riau, maka dapat disajikan pada gambar berikut.

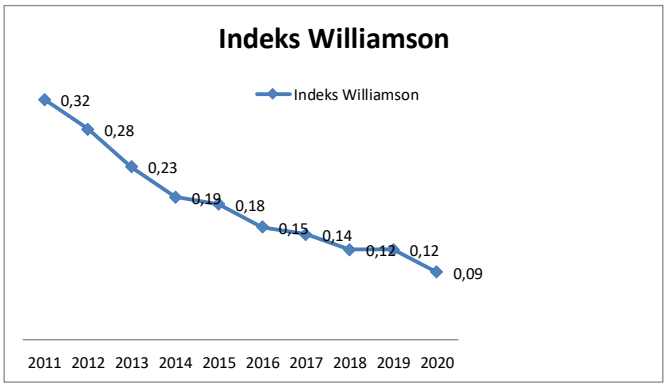

Sumber: BPS Riau, Data olahan

Gambar 1: Indeks Williamson

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan di Provinsi Riau dalam 10 tahun terakhir selalu mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2019 ketimpangan di Provinsi

Riau sama pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,12. Menurut (Arsyad, dalam Hidayat 2018) bahwa kriteria untuk mengetahui tingkat Indeks Williamson yaitu : ketimpangan tinggi jika V_w > 0,35, ketimpangan sedang jika V_w = 0,21-0,35, sedangkan ketimpangan rendah jika V_w < 0,21.

Hal ini berarti ketimpangan di Provinsi Riau menurut harga konstan pada tahun 2011 hingga 2013 termasuk kategori ketimpangan sedang karena Indeks Williamson berkisar pada 0,32-0,23. Kemudian pada tahun 2014 hingga tahun 2020 ketimpangan di Provinsi Riau termasuk dalam kategori rendah karena Indeks Williamson berkisar pada 0,19 – 0,09.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang di gunakan dalam penelitian. Data yang baik layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki ditribusi normal. Untuk melakukan pengujian asumsi normalitas data tersebut dilakukan dengan menggunakan pengujian *Jarque Berra* (JB), jika probabilitas JB lebih besar dari 0,05 maka data tersebut normal, tetapi apabila lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.

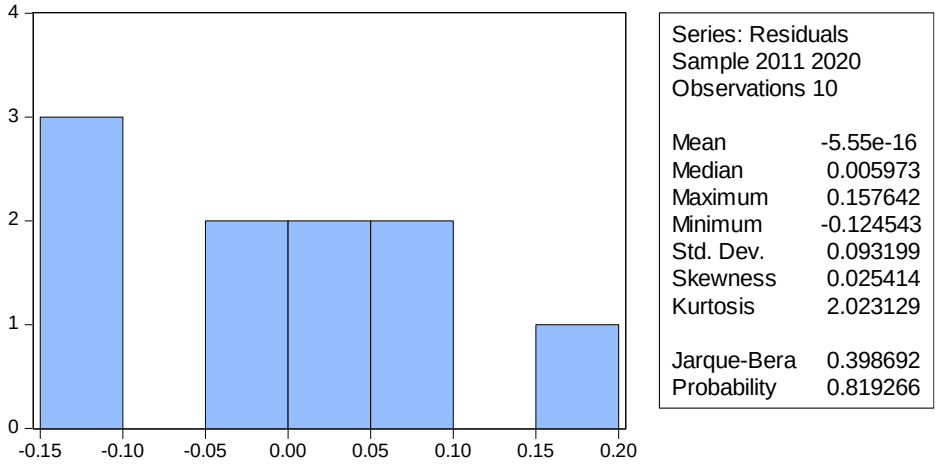

Sumber: Data olahan 2021

Gambar 2. Uji Normalitas dengan Jarque-Berra

Berdasarkan hasil olahan di atas terlihat bahwa probabilty jarque-berra sebesar 0.398692, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitasini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan. Pengujian ini di lakukakn dengan melihat dari tolerance dan variance infation factory (VIF). Pedoman model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi mendekati 1.

Tabel 1. Uji Multikolenialitas

Variance Inflation Factors

Date: 09/15/21 Time: 20:00

Sample: 2011 2020

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.337598	2561.665	NA
LOG(X1)	0.007897	2586.824	1.490293
LOG(X2)	0.002778	937.7266	1.009085
LOG(X3)	0.005268	343.5609	1.481632

Sumber : Data olahan 2021

Pada tabel diatas tidak ada yang melebihi dari angka 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tersebut masih jauh di bawah 10.

Uji Heterokedastisitas

Cara mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan melakukakan pengujian heteroskedastisitas test: Breusch-pagan-Godfrey. Jika signifikansi dari prob*R < 0,05 maka model tersebut mengandung heterokedastisitas, dan apabila signifikansi dari prob*R > 0,05 maka model tersebut mengandung heterokedastisitas.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.861167	Prob. F(3,6)	0.0749
Obs*R-squared	6.587710	Prob. Chi-Square(3)	0.0863
Scaled explained SS	1.213214	Prob. Chi-Square(3)	0.7498

Sumber: Data olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengujian heterokedastisitas dapat di lihat probability obs*R-Square= 0.0863 atau lebih dari 0.05. sehingga dapat di simpulkan data dalam variabel penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas pada model penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan pelanggaran asumsi non-autokorelasi. Hal ini disebabkan karena adanya korelasi antar gangguan/*error* pada setiap pengamatan. Autokorelasi juga dapat dikatakan kesalahan dari gangguan periode tertentu berkorelasi dengan gangguan/*error* dari periode sebelumnya. Permasalahan autokorelasi hanya relavan digunakan jika data yang dipakai adalah *time series*. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji *lagrane multiplier (LM-test)*. Untuk mendeteksi apakah dalam model yang digunakan dalam penelitian ini terdapat autokorelasi terhadap variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya dapat dilihat jika nilai signifikansi dari prob*R < 0,05 maka model tersebut mengandung autokorelasi, tetapi apabila nilai signifikansi dari prob*R > 0,05 maka model tersebut tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.875881	Prob. F(2,4)	0.1682
Obs*R-squared	5.898178	Prob. Chi-Square(2)	0.0524

Sumber: Data olahan

Berdasarkan table diatas pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier (LM-test)* dapat diliihat bahwa nilai probability obs*R-squared adalah 0,0524 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data dalam variabel penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 09/15/21 Time: 19:55
Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.30455	1.826910	6.187797	0.0008
LOG(X1)	-0.556968	0.088866	-6.267509	0.0008

LOG(X2)	0.024231	0.052709	0.459713	0.6619
LOG(X3)	-0.226830	0.072581	-3.125191	0.0204

R-squared	0.946321	Mean dependent var	-1.776931
Adjusted R-squared	0.919481	S.D. dependent var	0.402260
S.E. of regression	0.114145	Akaike info criterion	-1.213525
Sum squared resid	0.078174	Schwarz criterion	-1.092490
Log likelihood	10.06762	Hannan-Quinn criter.	-1.346299
F-statistic	35.25838	Durbin-Watson stat	3.004094
Prob(F-statistic)	0.000331		

Sumber: Data olahan 2021

Persamaan Linier Berganda:
Y = 11.30455 - 0.556968 (X1) + 0.024231 (X2) – 0.226830(X3).
Dari persamaan diatas dapat kita simpulkan bahwa pada saat variabel DAU, belanja modal dan investasi bernilai 0 atau konstan, maka nilai ketimpangan pembangunan adalah sebesar 11.30455. Nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar -0.556968 yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan DAU sebesar 1 satuan maka ketimpangan pembangunan akan menurun sebesar 0.556968. dengan asumsi variabel dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal sebesar 0.024231 yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan belanja modal sebesar 1 satuan maka ketimpangan pembangunan akan naik sebesar 0.024231. dengan asumsi variabel dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar -0.226830yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan investasi sebesar 1 satuan maka ketimpangan pembangunan akan menurun sebesar 0.226830. dengan asumsi variabel dianggap konstan.

Hasil Uji Statistik
Hasil Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan program Eviews. Adapun penjelasan mengenai *output* regresi linier berganda yang dihasilkan pada tabel 5 Sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum
   Secara parsial, DAU pada nilai t-statistik yaitu -6.267509 < 1.943 dengan artian DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.
2. Belanja Modal
   Secara parsial, belanja modal pada nilai t-statistik yaitu 0.459713 < 1.943 dengan artian belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.
3. Investasi
   Secara parsial, investasi pada nilai t-statistik yaitu -3.125191 < 1.943 dengan artian investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.

Hasil Uji F

Uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan/bersama-sama. Uji f pada penelitian ini dilakukan menggunakan program Eviews dengan hasil regresi linier berganda f-statistik yaitu 35.25838 dengan nilai probabilitas yaitu 0.000331 < 0,05 ini menunjukkan bahwa DAU, belanja modal dan investasi secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.

Hasil Uji Determinasi

Koefisien determinasi mencerminkan besarnya sumbangan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel terikat secara bersama-sama, dengan tujuan mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai *Rsquare* antara $0 < R^2 < 1$. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka model yang di di usulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara DAU, belanja modal dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan sebesar 0.946321. Nilai ini berarti sebesar 94,63% ketimpangan pembangunan di pengaruhi oleh DAU, belanja modal dan investasi. Sedangkan 0,0537% ketimpangan pembangunan di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan hasil dari regresi linier berganda DAU berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,0008 terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak dana alokasi umum maka keteimpangan pembangunan di provinsi riau semakin menurun. Sesuai yang dikemukakan oleh (Bakri,2015) bahwa alokasi belanja pemerintah yang cukup ini akan mendorong pertumbuhan pada daerah tersebut melalaui peningkatan produksi barang dan jasa. Dengan demikian, daerah dengan alokasi dana yang memadai akan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut, sedangkan daerah yang tidak memiliki alokasi dana yang memadai akan dapat memperlambat pertumbuhan daerah tersebut sehingga kondisi ini akan dapat menngkatkan ketimpangan pembangunan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan hasil dari regresi linier berganda Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan sebesar 0.6619 terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak belanja modal maka tidak akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini sesuai yang dikemukakan oleh (Anshari,2018) bahwa belanja modal yang tidak merata, menyebabkan ketimpangan tinggi karena hanya terpusat pada daerah tertentu yang memiliki potensial tinggi dan daerah yang tidak potensial cenderung mendapatkan belanja modal lebih rendah yang berujung ketidakmerataan pembangunan.

Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan hasil dari regresi linier berganda investasi berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0.0204 terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak investasi maka keteimpangan pembangunan di Provinsi Riau semakin menurun. Sesuai dengan teori Sadono Sukirno (dalam Yuki Angelia,2010) bahwa semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga, sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiantoro Hartono,2008) dalam penelitiannya ia mengemukakan bahawa setiap peningkatan investasi yang berarti peningkatan penanaman modal maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran sehingga ketimpangan pembangunan akan berkurang.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini pengkajian hanya dilakukan dengan waktu 10 tahun terakhir dengan metode indeks williamson dan regresi linier berganda, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya agar melakukan kajian yang lebih panjang terkait series dalam penelitian dan penggunaan alat uji yang ada, sehingga diharapkan hasil yang didapat lebih rinci dan lebih mendalam terkait pengaruh antar variabel bebas dan terikat.

KESIMPULAN

Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diukur dengan Indeks Williamson pada tahun 2011-2013 mengalami ketimpangan sedang, kemudian memasuki tahun 2014-2020 ketimpangan di Provinsi Riau tergolong ketimpangan rendah. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh DAU, belanja modal dan investasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil olahan Eviews dengan uji regresi linier berganda yang secara bersama-sama keempat variabel variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan dengan R-square sebesar 0.946321, atau dengan kata lain 94,53% ketimpangan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh DAU, belanja modal dan investasi. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. Investasi berpengaruh negatif dan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Muhammad dan Siti Rahayu. 2018. *Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadratik.* Vol 7, No 1, ISSN: 2089-8827 hal 14-22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Halim, Abdul dan Muhammad Syafam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat

Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Malang: UB Press.

Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belana Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah.* Artikel

Darwanto dan Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Tadaro, Michale P dan Smith, Stephen C. 2011, *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Nurhuda, Ramna.M.R. Khairul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. Vol 1, No 4, Hal 110-119.

Sanjaya, Luthfian Riza, Endriatmo Soetarto dan Andrea Emma Pravitasari. 2018. *Ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (kajian pada kabupaten Kotawaringin Timur dan pemekarannya).* Vol 21, No 2.

Bakri, Syafrizal dan Hasdi Aimon. 2015. *Analisi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat dan kebijakan penanggulangannya*. Vol 4, No 7.

Rafi'i, Ahmad, Dedi Budiman Hakim dan Eka intan Kumala Putri. 2018. *Ketimpangan pembangunan antar wilayah pembangunan di provinsi Papua Barat*. Vol 2, No 3, Hal 244-257.

Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadin. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi).* Vol 10, Hal 157-170

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Niaga Swadaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2016-2019. Riau Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau 2017-2020. Riau Dalam Angka.

Ariefrianto, M., D. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujrati, D., N., dan Porter. D., C., 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Kelima.* Jakarta: Salemba Empat.